

Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pembangunan Nagari di Kenagarian Lingkuang Aua

Fery Kurniawan¹, M. Fachri Adnan², Zikri Alhadi³

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia

²Universitas Negeri Padang, Indonesia

³Universitas Negeri Padang, Indonesia

KATA KUNCI

Efektivitas, Kepemimpinan, Pembangunan Nagari, Tungku Tigo Sajarangan.

KORESPONDEN

No. Telepon: **+62 85375532233**

E-mail:

ferykurniawan250@yahoo.com,

fachriadnan@fis.unp.ac.id

zikrialhadi@fis.unp.ac.id

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dalam pembangunan nagari di Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan tungku tigo sajarangan dalam pembangunan nagari belum optimal. Masalah yang ditemukan dalam penelitian pembangunan nagari oleh tungku tigo sajarangan di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yaitu kurang berperannya tungku tigo sajarangan dalam pembangunan nagari dari segi fisik dan dalam memberikan saran-saran atau arahnya dalam pembangunan nagari, kurangnya koordinasi antara tungku tigo sajarangan dengan pemimpin formal serta kurang adanya sumbangan fikiran, tenaga, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nagari di Kenagarian Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman t yang kurang berperan aktif dalam ikut membantu pembangunan nagari.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pengamatan pada seorang seminar ahli atau praktis. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa kepemimpinan yang efektif mempunyai sifat atau ciri ciri tertentu yang sangat penting misalnya pandangan kedepan. Martinis yamin dan Maisah (Yasmin, 2010) menyebutkan kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin.

Kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaannya dikemukakan oleh Sutiknoantara lain: 1) Tipe Demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan

terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang luas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. 2) Tipe Kharismatik adalah daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat bebas dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut dikagumi. 3) Tipe Meliteristik adalah pemimpin dalam mengarahkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah, senang bergantung dengan pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan (Sutikno, 2014).

Sistem kepemimpinan yang ada di Sumatera Barat cukuplah unik. Di ranah Minangkabau ini, tidak saja di kenal satu jenis kepemimpinan, tetapi tiga jenis yang dikenal dengan konsep kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan (tungku tiga sejarangan) yang merupakan sebuah kesatuan dari kepemimpinan Ninik Mamak (adat istiadat), Alim Ulama (agama), dan Cerdik Pandai (ilmu pengetahuan/ pemerintahan). Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak terlepas dari perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau sendiri.

Menurut Badudu-Zain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 kepemimpinan di Minangkabau yaitu tungku tigo sajarangan: (1) Ninik Mamak, yaitu orang-orang tua kepala adat Minangkabau (Sumatera Barat) orang yang paham akan adat istiadat; para penghulu adat, (2) Alim Ulama, yaitu orang-orang alim; para ulama islam; para khay, (3) Cadiak pandai (cerdik pandai), yaitu kaum terpelajar, intelektual. Ketiga pemimpin ini menjadi pemimpin informal/Tigo Tungku Sajarangan dalam sebuah nagari Minangkabau. Kebijakan pemimpin informal/Tigo Tungku Sajarangan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pembangunan, karena pemimpin informal lah yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keikutsertaan pemimpin informal atau Tungku Tigo Sajarangan di dalam proses pembangunan nagari dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain : (1) keterlibatan aktif atau peranan pemimpin informal dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan, arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. (Tjokroamidjojo. 1987).

Pembangunan nagari merupakan salah satu tugas seorang pemimpin. Menurut Taliziduhu Ndraha pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa berdasarkan otonomi desa, sedangkan pembangunan di desa adalah pembangunan nasional yang berlokasi di desa (Ndraha, 1994). Dapat dilihat pembangunan nagari atau desa bukan hanya tugas seorang pemimpin, namun masyarakat juga ikut serta berperan dalam pembangunan nagari tersebut. Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sendiri, selain pemimpin formal seperti Wali Nagari, Tungku Tigo Sajarangan sebagai pemimpin informal juga ikut serta dalam pembangunan nagari bersama masyarakat.

Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat masih aktif berperan dalam pembangunan nagari. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan ini. Keefektifan kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan memang terbilang aktif dan baik, namun dalam pembangunan nagari dari segi fisik, Tungku Tigo Sajarangan masih kurang ikut berperan serta. Sehingga pembangunan nagari dari segi fisik tersebut masih terdapat masalah-masalah. Selain itu,

kurangnya koordinasi dalam kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dengan pemimpin formal seperti wali nagari juga menjadi faktor dalam mempengaruhi pembangunan nagari di Kenagarian Lingsuang Aua.

Masyarakat di Nagari Lingsuang Aua juga menjadi faktor yang mempengaruhi keefektifitasan pemimpin Tungku Tigo Sajarangan dalam pembangunan nagari. Dikarenakan masyarakat kurang memberikan dukungannya seperti sumbangan fikiran, tenaga, serta tanggung jawab mereka dalam ikut serta berperan guna pembangunan nagari di Kenagarian Lingsuang Aua ini. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, bahwa adanya masalah dalam efektivitas kepemimpinan informal/Tungku Tigo Sajarangan dalam pembangunan nagari di Kenagarian Lingsuang Aua Pasaman Barat yang belum terwujud sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dalam Pembangunan Nagari

Pada dasarnya kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Adanya fungsi kepemimpinan dapat dilihat tingkat dukungan (support) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi. (Hasibuan 1990 : 143). Setiap ide atau program pembangunan desa (nagari) hendaknya memperhitungkan keberadaan pemimpin informal atau tokoh masyarakat, karena dengan melalui kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat maka ide-ide yang akan dilontarkan atau diajukan akan mendapat tanggapan dari masyarakat. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah menerima dan melaksanakan ide-ide tersebut, besar kemungkinan akan dapat diterapkan untuk masyarakat secara keseluruhan. (Siagian, 1983:18).

Dari pengertian efektivitas kepemimpinan yang dijelaskan pada bab sebelumnya kaitannya dengan pemimpin informal dalam pembangunan masyarakat nagari, mempunyai arti bahwa pemimpin informal menjadi suatu bagian dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat menjadikan tempat meminta masukan serta saran bagi masyarakat nagari dalam penyelenggaraan pembangunan nagari yang sesuai dengan falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Di Kenagarian lingsuang Aua pemimpin informalnya memang menjadi suatu bagian dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari betapa besarnya efektivitas pemimpin informal

dalam mengadakan acara-acara adat, kalau tidak pemimpin informal maka acara tersebut tidak bisa dilanjutkan atau dilaksanakan. Secara lebih rincinya penulis membedakan efektivitas pemimpin informal ini kedalam dua segi yaitu segi fisik dan segi non fisik:

1. Pembangunan nagari Segi fisik

Pembangunan dari segi fisik mencakup pada pembangunan-pembangunan yang berbentuk bangunan, seperti jembatan, jalan, puskesmas. Memang pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi pemimpin informal di kenagarian Lingkung Aua tidak ikut sertakan padahal yang lebih tau hal-hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu pemimpin informal, karena pemimpin informal yang tinggal dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam aspek fungsi pembangunan, efektivitas pemimpin informal pembangunan nagari dari segi fisis dapat dilihat sebagai berikut:

a. Fungsi perencanaan pembangunan.

Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya berdasarkan hukum yang ada. Dalam fungsi perencanaan ini pemimpin informal tidak diikutsertakan oleh pemimpin formal. Dalam proses perencanaan yang ikut rapat Cuma pemimpin formal yaitu pemerintah nagari yang terdiri dari anggota KAN dan BAMUS Nagari.

b. Perumusan Program Kerja.

Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dalam proses kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, prasarana yang diperlukan.

c. Pelaksanaan

Jika suatu rencana yang realita, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggalah pelaksanaan. Pelaksanaannya juga dilakukan oleh pemimpin formal tidak mengikutsertakan pemimpin informal.

d. Penilaian hasil-hasil yang dicapai.

Jika hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka untuk membandikan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai perlu diadakan penelitian. Dalam proses pengawasan pembangunan ini pemimpin informal bisa mengawasi tanpa tanggungjawab kepada pemerintahan nagari. Yang bertanggungjawab atas program pembangunan tersebut tetaplah pemimpin formal (pemerintahan nagari)

Dari keterangan diatas berarti para pemimpin informal “(ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai) tidak menjalankan salah satu tugas dan fungsinya sebagai pemimpin masyarakat yaitu berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja pemerintah nagari. Dalam juga pelaksanaan pembangunan nagari, tanggung jawab penuh terletak pada pemimpin itu sendiri, baik pemimpin formal maupun informal. Bagi Negara yang anggota masyarakatnya masih bersifat tradisonal , emosional dan paguyuban, maka pemimpin informal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan anggota masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena hubungan pribadi antara pemimpin dan mereka yang dipimpin sangat erat dan dihargai.

2. Pembangunan nagari Segi Non-Fisik

Dari hasil wawancara penulis dengan pemimpin tungku tigo sajarangan dan pemimpin formal diatas terbukti bahwa kegiatan pembangunan dari segi non fisik belum semuanya efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan terlaksana, hal ini dari beberapa indicator sebagai berikut:

1) Agama

Dalam hal ini pemimpin tungku tigo sajarangan sudah sangat berperan dengan diadakannya wirid pengajian sekali seminggu sehingga masyarakat mendapatkan siraman rohani dan memperkuat keimanan mereka. Contoh lain dengan didirikannya TPA bagi anak-anak, disini tujuan utamanya agar anak-anak mendapatkan AL-Quran dan menghindari kebutaan dalam membaca AL-Quran. Pemimpin tungku tigo sajarangan turun langsung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan bekerjasama dengan masyarakat. Dalam aspek fungsi pembangunan, efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan pembangunan nagari dari agama dapat dilihat sebagai berikut:

a) Fungsi perencanaan pembangunan.

Suatu rencana adalah suatu keputusan tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Keputusan membangun dibuat oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakilnya berlandaskan hukum yang ada. Dalam fungsi perencanaan ini pemimpin tungku tigo sajarangan langsung mengadakan rapat dengan masyarakat dan merencanakan program-program yang akan dilakukan. Dalam membuat program ini pemimpin tungku tigo sajarangan beserta masyarakat merundingkan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

b) Perumusan Program Kerja.

Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan, program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Dalam program kerja itu telah ditentukan prioritas kegiatan, sumber pembiayaan, lokasi proyek yang hendak direalisasi, prosedur kerja, koordinasi, sitem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, presarana yang diperlukan. Dalam hal perumusan program ini pemimpin tungku tigo sajarangan beserta masyarakat merapatkan bagaimana cara pelaksanaannya, kemudian lokasi, contohnya wirit pengajian mingguan diadakan di masjid atau musholla, atau TPA yang dilakukan di masjid atau dirumah guru mengajinya, dan wirit yasin yang dilakukan bergantian secara bergilir di rumah penduduk dan sebagainya.

c) Pelaksanaan

Jika sesuatu rencana yang realistis, praktis, dan pragmatis telah disusun, dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggalah pelaksanaannya. Pelaksanaan

program yang sudah direncanakan dan dirumuskan oleh seluruh masyarakat termasuk pemimpin tungku tigo sajarangan itu sendiri.

d) Penilaian hasil-hasil yang dicapai.

Jika hasil tersebut diatas telah dilaksanakan, maka untuk membandingkan dan mengukur hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai perlu diadakan penelitian. Dalam pengawasan sebenarnya semua masyarakat mengawasi jalannya program ini, apabila terjadi penyimpangan dari tujuan utamanya maka masyarakat bisa memberitahukannya pada pemimpin tungku tigo sajarangan, dan kemudian pemimpin informallah yang akan memberitahukan kepada masyarakat agar mengubahnya pada tujuan utama.

Dilihat dari keterangan diatas sangat jelas nampak begitu besar efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan yang turun langsung dalam proses pembangunan dalam bidang agama. Pemimpin tungku tigo sajarangan terutama alim ulama sudah menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu menanamkan akidah islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari, mensosialisasikan fatwa tentang syariat islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari, mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari AL-Quran dan Sunah Rasul, memakmurkan masjid, dalam rangka mewujudkan kembali ke surau, membina umta untuk mewujudkan nagari yang Islami, menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dalam nagari. Tapi dalam kegiatan pembangunan dari segi agama ini alangkah baiknya pemimpin formal diikutsertakan, kalau pemimpin tungku tigo sajarangan dikitsertakan maka akan lebih menguntungkan masyarakat lagi, baik itu dalam segi biaya dan juga akan menciptakan keseragaman program antar kampung di Kenagarian Lingkuang Aua.

2) Ekonomi

Efektivitas pemimpin informal dalam pembangunan bidang ekonomi kurang terlaksana hal ini dilihat dari beberapa program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat yang hanya dilakukan oleh pemimpin formal. Dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Tapi pada kenyataannya dalam program pemberdayaan masyarakat di Kenagarian Lingkuang Aua yang efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan hanya pada proses pelaksanaannya, untuk mempengaruhi, memberi ide-ide dan saran-saran kurang dilakukan dan sebenarnya disinilah letak tugas dari pemimpin tungku tigo sajarangan. Pelaksanaan pembangunan nagari, tanggung jawab penuh terletak pada pemimpin itu sendiri, baik pemimpin formal maupun tungku tigo sajarangan. Bagi Negara yang anggota masyarakatnya masih bersifat tradisonal, emosional, maka pemimpin tungku tigo sajarangan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan anggota masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian harusnya pemimpin tungkutigo sajarangan harus berperan untuk kedepannya demi mensejahterakan masyarakat.

3) Adat

Dari hasil penelitian diatas pemimpin tungku tigo sajarangan sangat berperan dalam pembangunan bidang adat. Apalagi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat. Apabila pemimpin tungku tigo sajarangan melaksanakan pereannya maka akan terwujud ketentraman dan kedamaian antara masyarakat, dan salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat akan terwujud. Dan lebih terwujudnya tugas dan fungsi ninik mamak, alim ulam, cadiak pandai diantaranya menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut adat salingka nagari, bekerjasama dengan alim ulama, cadiak pandai dan Majelis Musyawarah Adat dan Syarak dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan agama dan lain-lain.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan tungku tigo sajarangan dalam pembangunan nagari .

Untuk menciptakan pembangunan yang baik dan tujuan pembangunan tercapai maka pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin tungku tigo sajarangan saja tapi juga harus ada kerjasama dengan masyarakat. Karena masyarakat yang lebih mengerti akan kebutuhan nagarinya. Untuk itu diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan harus semakin luas dan merata dan memikul beban pembangunan, bertanggung jawab atas pelaksanaannya maupun pemeliharannya. Dalam keadaan seperti ini diperlukan unsur-unsur penggerak yang ada pada lapisan masyarakat terbawah yang tidak saja memiliki kemampuan sumber daya yang ada, akan tetapi diharapkan pula memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat itu sendiri yakni mereka dianggap sebagai pemimpin, karena mereka ini yang mempunyai pengaruh, daya dorong dalam rangka motivasi untuk pembaharuan. (Tjokroamidjojo, 1986).

Pemimpin yang dibuthkan untuk menggerakkan masyarakat itu adalah pemimpin tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ualama, cadiak pandai) yang mana pemimpin informal. Dan juga pelaksanaan pembangunan nagari, tanggung jawab penuh terletak pada pemimpin itu sendiri, baik pemimpin formal maupun pemimpin tungku tigo sajarangan. Bagi Negara yang anggota masyarakatnya masih bersifat tradisonal, emosional dan paguyuban, maka pemimpin tungku tigo sajarangan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menggerakkan anggota masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena hubungan pribadi antara pemimpin dan mereka yang dipimpin sangat erat dan dihargai.

Jadi bahwasanya pemimpin tungku tigo sajarangan dan masyarakat akan lebih bisa menggerakkan masyarakat lainnya didalam pembangunan di nagari karena dari beberapa factor yang terjadi masyarakat kurang memperhatikan pembangunan didalam nagari seperti puskesmas, jembatan dan juga jalan. Dipembahasan ini factor pendukungnya pemimpin tungku tigo sajarangan sudah berperan aktif terhadap pembangunan dinagari dengan masyarakat. Banyak sekali telah dilakukannya pemimpin ini didalam nagari seperti menerapkannya ilmu agama dan wiridyasin di masjid.

Hal diatas dapat dilihat bebrapa besarnya efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan dalam pembangunan nagari dan juga pembangunan nagari akan tercipta jika adanya kerjasama yang baik antara pemimpin tungku tigo sajarangan, formal dan masyarakat. Disini pemimpin tungku tigo sajarangan berperan memberikan keterangan, masukan, memberikan ide-ide dan mempengaruhi masyarakat agar turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Pemimpin tungku tigo sajarangan di Kenagarian Lingkuang Aua sudah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, baik itu dari factor pendukung dan factor penghambat dalam sebuah pembangunan nagari. Buktinya keikutsertaan pemimpin tungku tigo sajarangan dalam kegiatan pembangunan nagari dan turun langsung serta mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Walaupun masi ada kendala-kendala yang dihadapi. Tapi disini pemimpin tungku tigo sajarangan harus bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

Dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pemimpin tungku tigo sajarangan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebab penelitian ini hanya menggambarkan efektivitas kepemimpinan tngku tigo sajarangan dalam pembangunan nagari dan bagaimana factor pendukung dan penghambat dalam pembangunan..

KESIMPULAN

Efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan dalam pembangunan dari segi fisik di Kenagarian Lingkuang Aua belum berjalan dengan baik. Hal ini pemimpin formal hanya mengikutsertakan pemimpin informal anggota BAMUS selain itu tidak diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan di bidang fisik. Selain itu efektivitas pemimpin tungku tigo sajarangan dari segi non fisik sebagian besar sudah terlihat walau masih ada yang belum terlaksana, contohnya dalam proses pemberian ide-ide, penyuluhan-penyuluhan, memberikan masukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Factor pendukung dan penghambat pemimpin tungku tigo sajarangan sudah berperan aktif terhadap pembangunan dinagari dengan masyarakat adapun factor pendukungnya masih belum berjalan dengan baik dikarnakan masyarakat kurang kerjasama dengan pemimpin tungku tigo sajarangan itu sendiri didalam nagari.

DAFTAR RUJUKAN

- Badudu, Zain. 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagindo, Yulizal Yunus Dt. Rajo. 2009. Sistem Kepemimpinan Minangkabau.
- Mochtar Naim. 2008. Konsep kepemimpinan Tungku Nan Tigo Sajarangan & Masalah Penerapannya dalam Rangka Kembali Ke Nagari. <http://www.pandaisikek.net/sosial-dan-seni-budaya-minang-kabau/tungku-tigo-sajarangan>. 24 Oktober 2008 18:39.
- Nasroen, M..1975. Dasar Filsafat Minang Kabau ; Penerbit Maju.
- Pemberdayaan Kembali Peran Pangulu (Penghulu) sebagai Penyelesai Konflik Kaum (Suku) di Minangkabau. Dalam Prosiding Seminar International Tradisi Lisan dalam Sistem Matrilineal. Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. 2015
- Pemerintah daerah
Pemerintahan nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang
pokok –pokok Pemerintahan nagari.

- R. Thaib. 2013. Memuliakan BundoKanduang". <http://tumbuhtumbuh.blogspot.com/2013/07/rauhthaib-memuliakan-bundokanduang.html>. Akses November 2014.
- Tjokroamidjojo. 1986. Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang
- Wibowo. 2013. Perilaku dalam Organisasi.. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.